

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang terus menunjukkan dinamika yang fluktuatif seiring dengan perubahan kondisi global dan domestik. Pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya bergantung pada aktivitas ekonomi di tingkat pusat, tetapi juga ditopang oleh kontribusi perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembangunan di daerah mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Apabila sistem keuangan diatur sendiri oleh daerah masing-masing akan mempermudah daerahnya membangun berbagai sarana publik serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah lebih mudah dan efektif, sehingga berbagai masalah kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat terselesaikan (Rizal Nurdin, 2018).

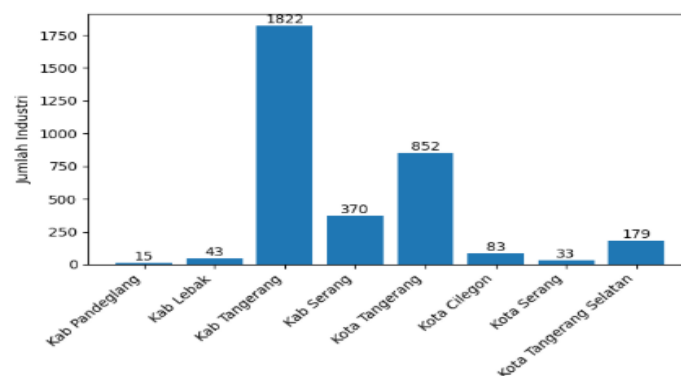
Sebagai bentuk penguatan pemerintahan daerah, Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang mulai efektif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, serta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi dan keuangannya sendiri sementara otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur

kebijakan pembangunan sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Kebijakan ini bertujuan agar pembangunan tidak hanya terpusat di tingkat nasional, melainkan berjalan dari daerah sebagai basis kekuatan ekonomi. Menurut Fahrul Anam & Kusuma (2021) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam Pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah. Salah satu indikator dalam menentukan kemandirian suatu daerah adalah dengan pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Fungsi utama PAD adalah membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, PAD menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah (Arifin, 2022).

Tingkat PAD juga menjadi indikator penting dalam mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Daerah yang memperoleh PAD dalam jumlah besar

cenderung tidak bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebaliknya, daerah dengan PAD yang rendah menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi. Dengan kata lain, semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya. Pada Tahun 2024 Provinsi Banten menempati peringkat pertama dari segi kemandirian fiskal berdasarkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yaitu sebesar 72,75%. Provinsi Banten memiliki struktur ekonomi yang relatif kuat, yang ditopang oleh keberadaan kawasan industri besar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kab Serang.

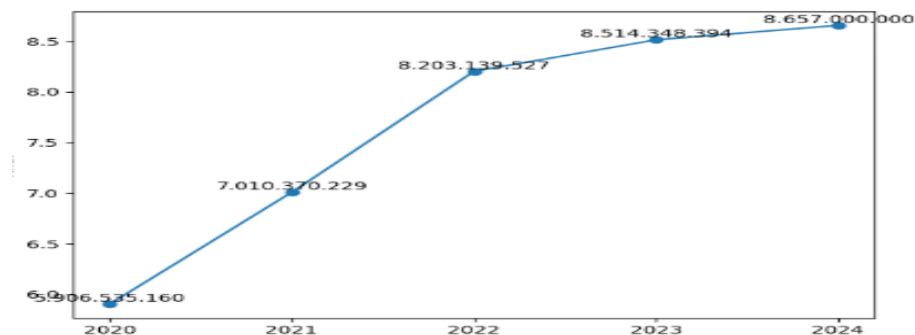


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 1.1 Jumlah Industri Besar dan Sedang Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2024 (Unit)

Provinsi Banten memiliki struktur ekonomi yang relatif kuat, yang ditopang oleh keberadaan kawasan industri besar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kab Serang. Kekuatan struktur ekonomi tersebut tercermin dalam tingkat kemandirian fiskal Provinsi Banten yang tergolong tinggi

dibandingkan banyak provinsi lain. Meskipun capaian PAD Provinsi Banten selama lima tahun terakhir menggambarkan tren peningkatan akan tetapi masih belum menunjukkan performa yang optimal. Hal tersebut terlihat dari fakta bahwa PAD pada periode 2015 dan 2016 justru menunjukkan capaian yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp11.259.988.203.000 pada tahun 2015 dan Rp12.242.867.786.000 pada tahun 2016, sehingga mengindikasikan bahwa potensi pendapatan daerah masih dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, meskipun Banten memiliki basis ekonomi yang kuat dan tingkat kemandirian fiskal yang baik, ruang peningkatan PAD tetap terbuka lebar melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah Berikut realisasi penerimaan PAD Provinsi Banten yang tertera pada gambar.

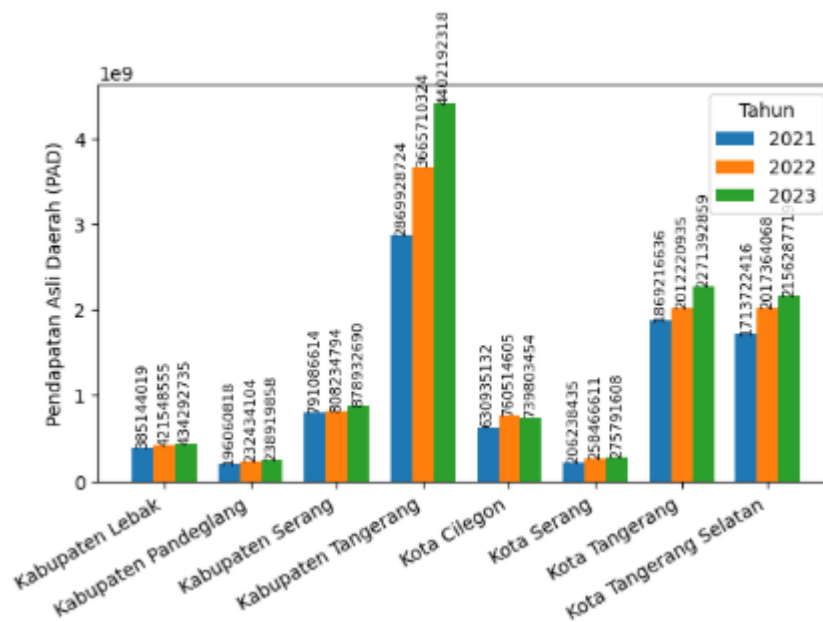


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 1.2 PAD Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Ketidakstabilan PAD ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih memiliki ruang yang luas untuk memaksimalkan pendapatan daerahnya. Kondisi tersebut juga tercermin dari adanya ketimpangan PAD antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten di mana Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan memiliki PAD yang jauh lebih tinggi

dibandingkan Kabupaten dan Kota lain seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kota Serang. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah di Provinsi Banten belum merata sehingga memungkinkan untuk bisa lebih dioptimalkan lagi. Berikut data PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:



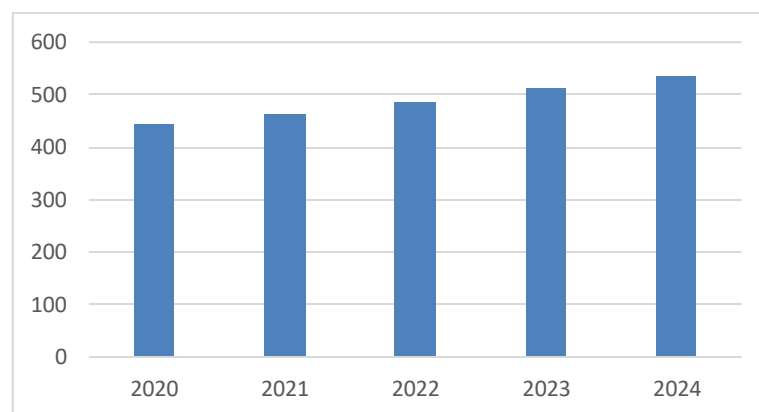
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 1.3 PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Tahun 2021-2023 (Triliun Rupiah)

Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah, diversifikasi basis ekonomi, serta penguatan sektor-sektor potensial menjadi strategi yang krusial untuk mengoptimalkan PAD. Penguatan strategi tersebut tidak hanya akan mendorong peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi Banten secara keseluruhan.

Menurut teori kapasitas pajak (*tax capacity*) yang dikemukakan oleh Bahl dalam Andriany dan Qibthiyah (2018), kapasitas pajak menggambarkan potensi kemampuan suatu pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak apabila pemungutan dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi serta ketersediaan basis pajak yang dimiliki pada periode tertentu. Teori ini dikembangkan dari konsep *taxable capacity* yang diperkenalkan oleh Findlay Shirras, yang secara konseptual menjelaskan bahwa tingkat penerimaan pajak sangat ditentukan oleh kapasitas ekonomi masyarakat. Kapasitas tersebut tercermin melalui tingkat pendapatan, struktur perekonomian, serta kondisi sosial dan ketenagakerjaan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Purwiyanto dan Tity Hernawati dalam Nurhabibah et al., (2021) menyatakan bahwa variasi penerimaan pajak sebagai basis pajak tidak terlepas dari kondisi makro rekonomi suatu wilayah, seperti pertumbuhan ekonomi, aktivitas investasi dan industrialisasi, serta karakteristik angkatan kerja termasuk tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian, PDRB, jumlah industri, dan tingkat pengangguran terbuka dapat dipandang sebagai indikator yang merepresentasikan kapasitas dan basis pajak suatu daerah, sehingga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya Hikmahyanti et al., (2021).

PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu (Hikmahyanti et al., 2021). Tinggi rendahnya PDRB menggambarkan tingkat produktivitas ekonomi dan kapasitas daerah dalam menghasilkan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi daerah, peningkatan PDRB umumnya berhubungan dengan bertambahnya aktivitas produksi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh penerimaan melalui mekanisme pajak dan retribusi. Dengan demikian, PDRB tidak hanya menjadi indikator tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan fiskal daerah dalam memperkuat PAD sebagai sumber pembiayaan mandiri. Berikut gambar yang menunjukkan PDRB Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Banten Tahun 2025

Gambar 1.4 PDRB Provinsi Banten tahun 2020-2024 (Triliun Rupiah)

Berdasarkan data PDRB Provinsi Banten pada periode 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, PDRB Banten tercatat sebesar Rp 459.666.415,8 juta.

Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 444.265.085,8 juta. Penurunan ini sejalan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas produksi, distribusi, perdagangan, serta mobilitas tenaga kerja dan barang. Momentum tersebut mencerminkan kontraksi aktivitas ekonomi di hampir seluruh sektor, terutama industri pengolahan dan perdagangan, yang merupakan sektor utama penopang perekonomian Banten.

Memasuki tahun 2021, perekonomian Banten mulai menunjukkan pemulihan dengan meningkatnya nilai PDRB menjadi Rp 463.472.925,9 juta. Pemulihan ini terus berlanjut pada tahun 2022 dengan kenaikan yang lebih kuat mencapai Rp 487.668.314,4 juta. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi kembali berjalan stabil seiring dengan relaksasi kebijakan pembatasan sosial dan peningkatan aktivitas sektor industri dan perdagangan. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana PDRB meningkat lebih lanjut menjadi Rp 511.800.304,1 juta. Pertumbuhan yang terjadi dalam dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan struktural ekonomi daerah dan peningkatan produktivitas pada beberapa sektor unggulan.

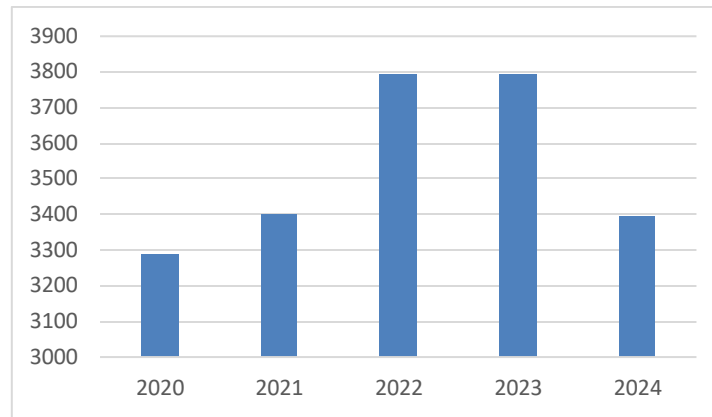
Peningkatan PDRB di Provinsi Banten sepanjang periode 2021–2024 mencerminkan adanya pemulihan serta penguatan kapasitas ekonomi daerah pasca perlambatan ekonomi, namun pertumbuhan output tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang konsisten, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara optimal dalam memperluas basis fiskal

daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dinamika pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur dan kinerja sektor industrinya, karena perkembangan industri yang produktif tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperluas basis pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan jumlah industri berkontribusi terhadap peningkatan PAD (Boimata et al., 2023).

Industri merupakan usaha untuk memproduksi barang jadi dengan bahan baku atau bahan mentah melalui proses produksi penggarapan dalam jumlah besar sehingga barang tersebut dapat diperoleh dengan harga serendah mungkin tetapi dengan mutu setinggi-tingginya. Secara teoritis, keberadaan industri besar dan sedang dapat meningkatkan PAD melalui beberapa mekanisme, antara lain peningkatan pajak daerah dari kegiatan usaha, peningkatan retribusi jasa usaha, serta bertambahnya aktivitas ekonomi turunan *multiplier effect* yang mempengaruhi sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.

Provinsi Banten merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri di wilayah barat Pulau Jawa, dengan konsentrasi kawasan industri yang tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Namun demikian, tingginya jumlah industri besar dan sedang belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan PAD. Hal ini menandakan bahwa penguatan struktur industri belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan basis fiskal daerah, serta belum terintegrasi dengan efektif dalam sistem

pemungutan pajak dan pengelolaan penerimaan daerah. Berikut gambar yang menunjukkan jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Banten.



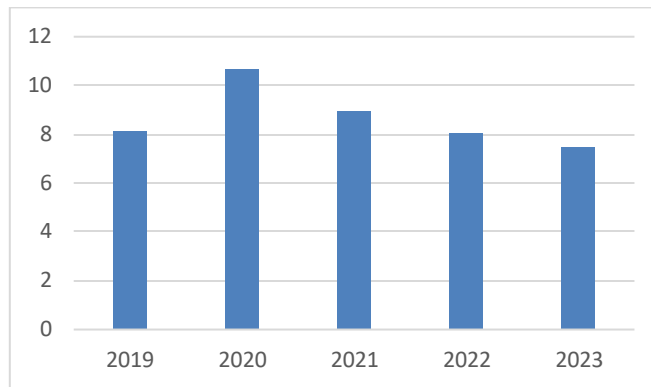
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Banten Tahun 2025

Gambar 1.5 Jumlah Industri Besar dan Sedang Provinsi Banten Tahun 2020-2024 (Unit)

Berdasarkan gambar tersebut, jumlah industri besar dan sedang di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari 3.291 unit pada tahun 2020 menjadi 3.794 unit pada tahun 2022 dan 2023, sebelum kemudian menurun menjadi 3.397 unit pada tahun 2024. Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika struktur industri yang dipengaruhi oleh kondisi investasi, kapasitas produksi, dan daya saing daerah dalam menarik pelaku usaha. Peningkatan jumlah industri besar dan sedang dapat memperkuat perekonomian daerah melalui penciptaan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja, sedangkan penurunan jumlah industri berpotensi membatasi penyerapan tenaga kerja dan aktivitas produksi. Selain jumlah industri salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yaitu faktor ketenagakerjaan (Tingkat Pengangguran terbuka). Ketika Tingkat pengangguran terbuka meningkat maka akan

menurunkan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi. Hal ini akan berdampak pada penurunan PAD (Rahman & Restiatun 2023).

Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang sekarang ini tidak bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang menunjukkan proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan meskipun aktif mencari dan siap bekerja. Peningkatan kesempatan kerja yang memadai dapat memperluas pendapatan masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal. Apabila tingkat pengangguran rendah, maka daya beli masyarakat meningkat sehingga konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan PAD melalui perluasan basis pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak perdagangan. Sebaliknya, apabila TPT tinggi, maka tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat menurun, sehingga aktivitas ekonomi lokal terhambat dan pada akhirnya menekan kinerja PAD. Sama halnya menurut Rahman & Restiatun (2023) yaitu ketika Tingkat pengangguran terbuka meningkat maka akan menurunkan kemampuan untuk membayar pajak dan retribusi. Hal ini akan berdampak pada penurunan PAD. Dengan demikian, TPT memiliki keterkaitan tidak langsung terhadap stabilitas pendapatan asli daerah melalui perannya dalam mempengaruhi tingkat pendapatan dan konsumsi Masyarakat. Berikut gambar yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Banten.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2025

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Tahun 2019-2023 (Persen)

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten mengalami fluktuasi dalam periode 2019–2023. Pada tahun 2019 TPT berada pada angka 8,11 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 10,64 persen pada tahun 2020 yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Setelah itu, TPT mulai menunjukkan tren penurunan menjadi 8,98 persen pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 8,09 persen pada tahun 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi dan meningkatnya aktivitas sektor industri dan perdagangan. Pada tahun 2023 TPT terus menurun hingga mencapai 7,52 persen, yang mengindikasikan membaiknya kondisi pasar kerja serta meningkatnya kapasitas daerah dalam menyediakan lapangan kerja. Tren penurunan ini mencerminkan perbaikan struktur ekonomi dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan dan stabilitas tenaga kerja.

Meskipun penurunan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya perbaikan kondisi pasar kerja, hal tersebut belum dapat dipastikan secara

langsung berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena berkurangnya jumlah penganggur tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pekerjaan, produktivitas, ataupun besarnya kontribusi aktivitas ekonomi terhadap penerimaan daerah. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja yang terjadi mungkin masih berada pada sektor informal dengan kapasitas pajak yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai sejauh mana penurunan tingkat pengangguran terbuka dapat berkontribusi terhadap peningkatan PAD, sehingga diperoleh pemahaman empiris yang kuat untuk mendukung perumusan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini, dinamika perekonomian daerah tidak dapat dipisahkan dari interaksi antara pertumbuhan ekonomi, kapasitas sektor industri, serta kondisi ketenagakerjaan yang tercermin melalui tingkat pengangguran terbuka. Variasi pada faktor-faktor tersebut berpotensi mempengaruhi kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal. Namun demikian, kajian empiris sebelumnya masih menunjukkan sejumlah kesenjangan penelitian, antara lain terbatasnya studi yang memasukkan variabel jumlah industri sedang dan besar serta tingkat pengangguran terbuka sebagai determinan PAD, serta adanya temuan yang tidak konsisten mengenai pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap PAD pada berbagai konteks wilayah. Selain itu, penelitian dengan cakupan khusus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dan menggunakan rentang data panjang hingga tahun

2023 masih jarang dilakukan, sehingga pemahaman mengenai dinamika fiskal daerah di wilayah tersebut belum sepenuhnya komprehensif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan melalui integrasi variabel ekonomi dan ketenagakerjaan dalam satu model analisis yang lebih lengkap, serta penggunaan data panel jangka panjang untuk memberikan gambaran empiris yang lebih akurat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Provinsi Banten. Dengan demikian, penelitian mengambil judul “Analisis Determinasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2010-2023” sebagai upaya memberikan pemahaman empiris yang dapat menjadi landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka identifikasi masalah yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, Jumlah Industri dan TPT secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2010–2023?
2. Bagaimana PDRB, Jumlah Industri dan TPT secara Bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2010–2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Industri dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2010–2023?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB, Jumlah Industri dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara Bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2010–2023?

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan memberikan manfaat, baik pada ranah teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Dari segi teoritis penelitian ini berupaya memperluas pemahaman mengenai hubungan antara PDRB, jumlah industri dan tingkat pengangguran terbuka dengan pendapatan asli daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Banten. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain yang mengkaji keterkaitan antara investasi domestik, pengangguran, dan pola konsumsi terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi nasional.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Dari segi praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Pemerintah, Penelitian ini diharapkan mampu menyediakan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaruh PDRB, jumlah industri, serta tingkat pengangguran terbuka terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang lebih tepat.
2. Universitas Siliwangi, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan dan menjadi rujukan yang bermanfaat, sekaligus memberikan masukan serta bahan perbandingan yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya maupun dalam penyusunan materi pembelajaran.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada dalam cakupan wilayah Indonesia. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, terutama Badan Pusat Statistik dan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Selain itu, data pendukung juga diambil dari sejumlah media daring yang dinilai relevan.

